



KEBIJAKAN RENCANA AKSI NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS MERKURI

Oleh:
Direktur Jenderal PSLB3
Jakarta, 22 Juli 2019

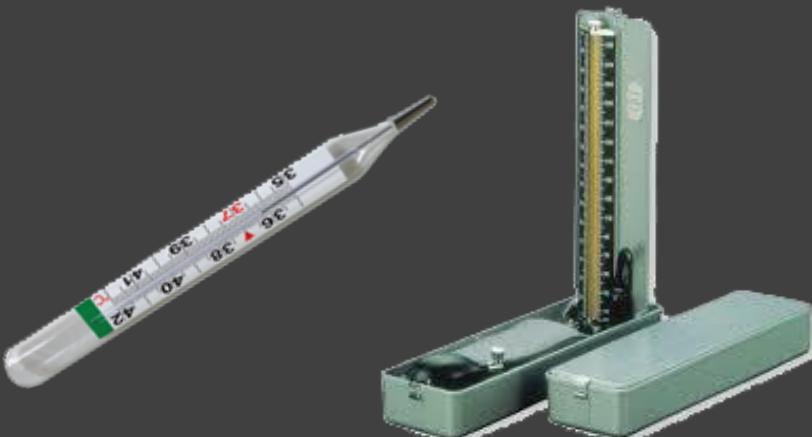


**Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

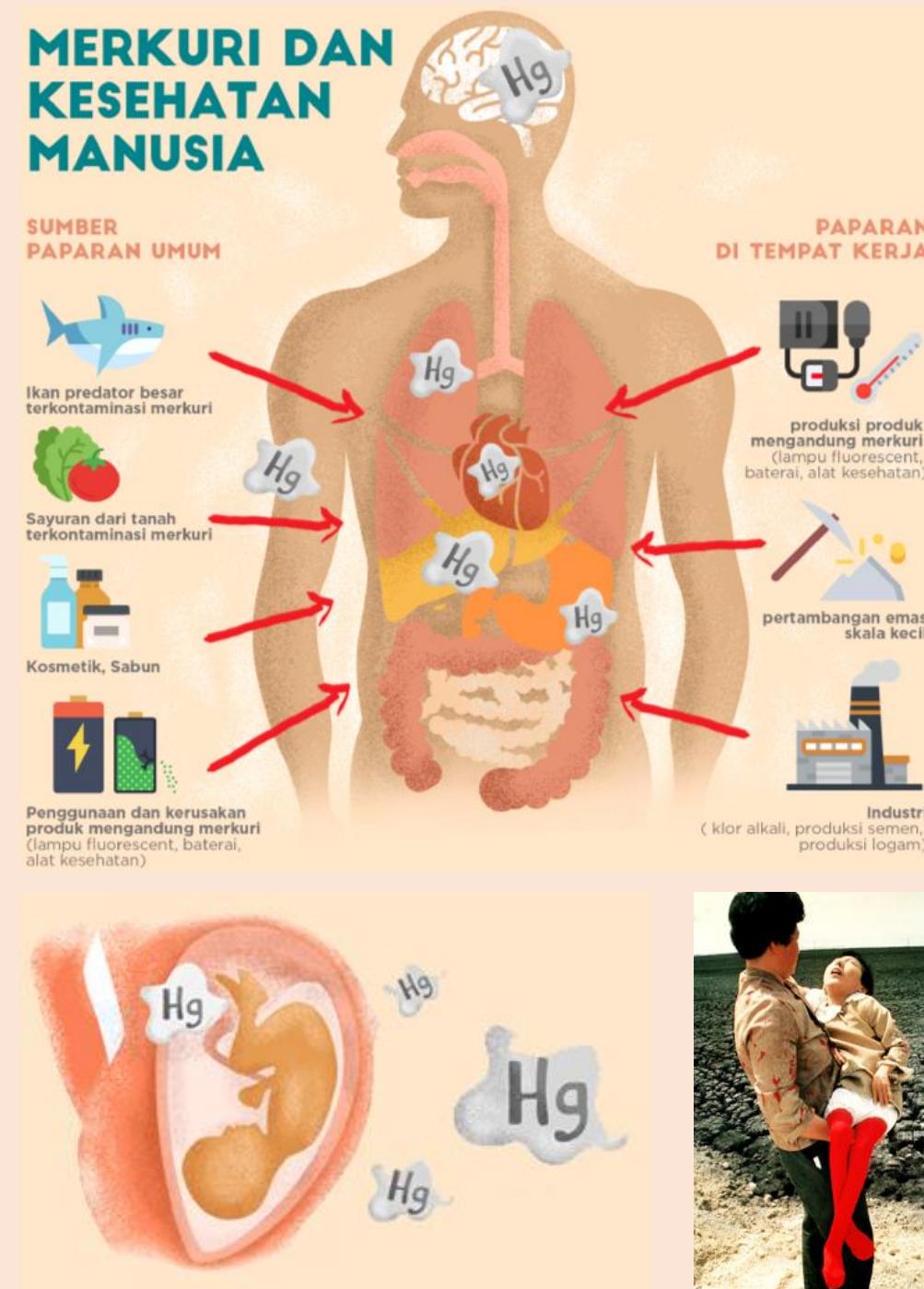
MENGAPA MERKURI ??

Merkuri (raksa; air raksa; *hydragryum*; *quicksilver*) adalah unsur kimia bernomor atom 80 dengan simbol Hg.

Merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat **toksik, persisten, bioakumulasi** dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer.



MERKURI DAN KESEHATAN MANUSIA



Pajanan Merkuri ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui :

- Menghirup udara yang terkontaminasi merkuri
- Mengkonsumsikan makanan dan minuman yang terkontaminasi
- Absorpsi/penyerapan melalui kulit

Pajanan Akut

Kerusakan paru-paru

Gangguan abdominal

Gangguan fungsi ginjal

Gangguan dan kerusakan kulit

Pajanan Kronis

Kerusakan ginjal

Kerusakan sistem saraf pusat

Pajanan pada janin bayi dapat mengakibatkan:



Aktivitas Ekspor – Impor Merkuri dan Senyawa Merkuri

Impor Merkuri di Indonesia Tahun 2011-2015 (Sumber: Kemendag)

No	Tahun	Alokasi (Kg)	Realisasi (Kg)
1.	2011	1326	552
2.	2012	560	40
3.	2013	90	40
4.	2014	500	499,68
5.	2015	-	-

Ket: impor merkuri yang digunakan pada industri lampu dan baterai yang dilakukan oleh IT-B2 yakni PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI)

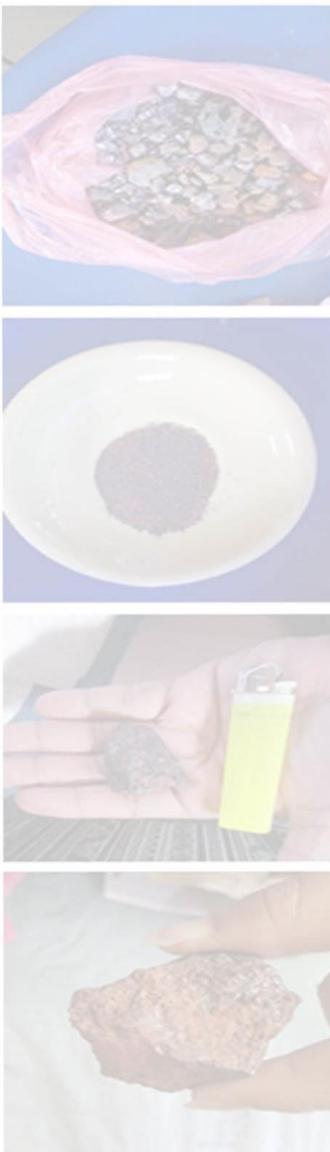
- Data Ekspor 2015-2016 (Sumber: Ditjen Bea dan Cukai):

HS Code	Uraian Barang	Tahun	Jumlah (kg)
2805.40.00.00	Merkuri (elemental)	2015	95.260
		2016	350.000

HS Code	Uraian Barang	Tahun	Jumlah (kg)
Senyawa Merkuri			
2852.10.10.00	Senyawa, anorganik atau organik, dari merkuri memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam - Mempunyai rumus kimia tertentu - - Merkuri Sulfat	2015	11.800
		2016	1.200
2852.10.90.00	Senyawa, anorganik atau organik, dari merkuri memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam - Mempunyai rumus kimia tertentu - - Lain-lain	2015	30.000
		2016	25.000

Sumber Merkuri Dalam Negeri

- Cinnabar (HgS / merkuri sulfida) adalah bijih utama merkuri.
- Tahun 2016-2017 praktik pertambangan batu sinabar marak dilakukan oleh penambang rakyat tanpa ijin.
- Penambang menjual batu cinnabar ke beberapa kota di Pulau Jawa, diantaranya Jakarta, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, dan Surabaya.
- Sejak tahun 2018 pertambangan batu sinabar dilarang



KONDISI GLOBAL

KASUS MINAMATA

- Tahun 1950-an pencemaran Teluk Minamata di Jepang menyebabkan 120 penduduk Minamata meninggal dan 800 orang menderita sakit.
- Biaya pembersihan lumpur sekitar 1,5 juta m³ selama 14 tahun dengan biaya USD 359 juta.



KAJIAN UNEP

- Kajian UN Environment (*United Nations Environment Programme*) tahun 2001 menyimpulkan bahwa MERKURI dan senyawanya menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara **GLOBAL**. Oleh karena itu perlu **TINDAKAN INTERNASIONAL**.



PROSES NEGOSIASI INTERNASIONAL

- Tahun 2009 UN Environment menyelenggarakan *Governing Council (GC)* membentuk *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* yang bertujuan menyusun instrumen hukum internasional tentang pengaturan MERKURI global.
- Pada 10 Oktober 2013, penandatanganan oleh 92 negara PBB tentang “**Minamata Convention on Mercury**”



Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Negara Pihak
110 negara

TUJUAN

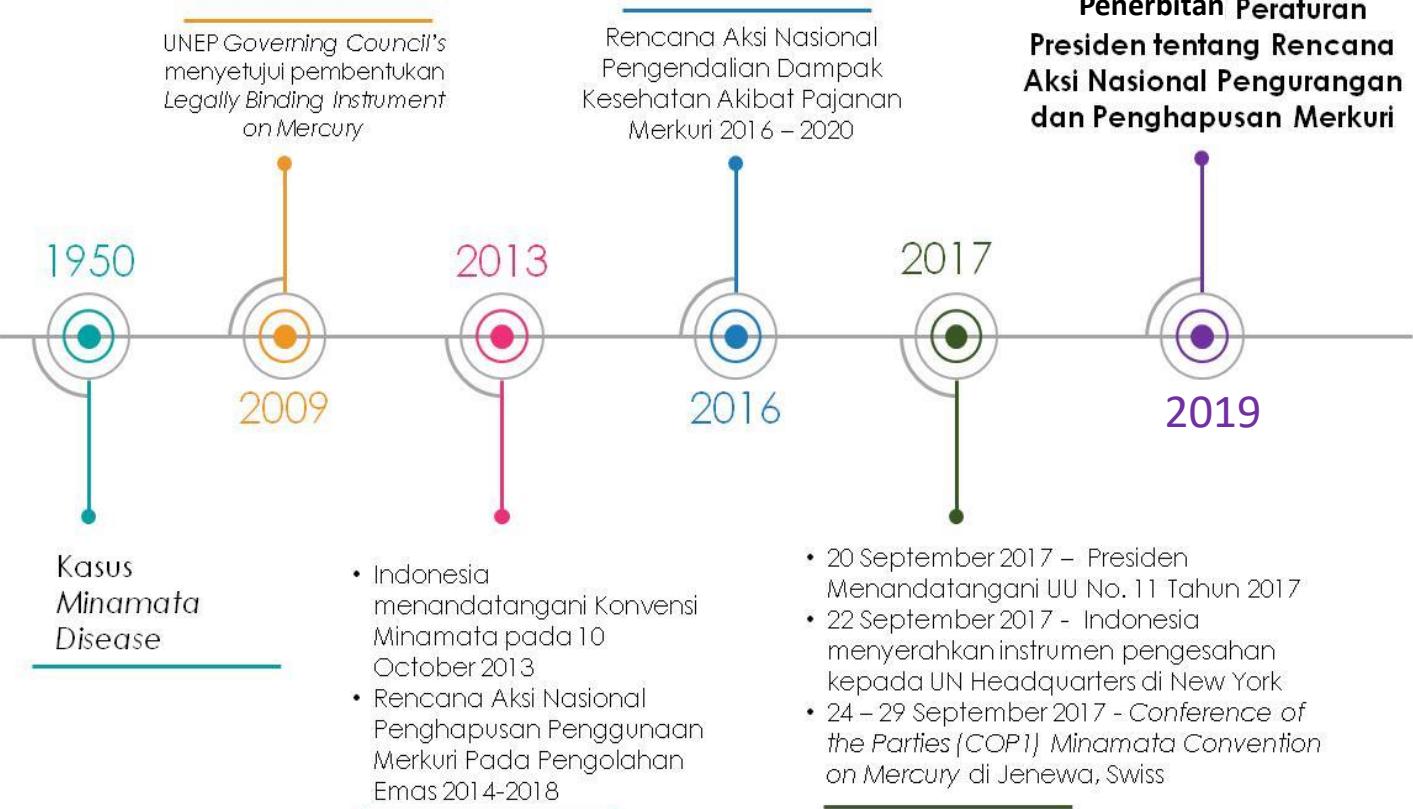
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik (disengaja)

MANDAT

Pembatasan, pengendalian, dan penghapusan penggunaan merkuri meliputi:

- Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri; Produk-produk Mengandung Merkuri; Proses Produksi yang menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri; Pertambangan Emas Skala Kecil; Emisi dan lepasan; Limbah Merkuri; Lahan terkontaminasi; Aspek Kesehatan

Konvensi Minamata mengenai Merkuri



Kebijakan Pemerintah



Arahan Presiden tanggal 9 Maret 2017, pada rapat kabinet terbatas tentang penghentian penggunaan merkuri di pertambangan rakyat

Ratifikasi Konvensi Minamata melalui UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Rapat Koordinasi Teknis Terbatas mengenai merkuri dipimpin Menteri LHK

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)

Penerbitan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)





Kondisi Lapangan
saat ini

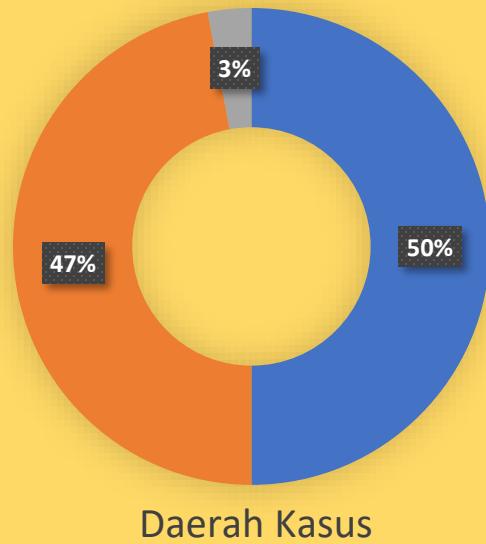
GANGGUAN KESEHATAN YANG DIALAMI MASYARAKAT



Gambaran kondisi masyarakat di Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri.

(Foto: Dokumentasi kegiatan Direktorat PB3, 2016)

Lokasi sampling: Kabupaten Wonogiri

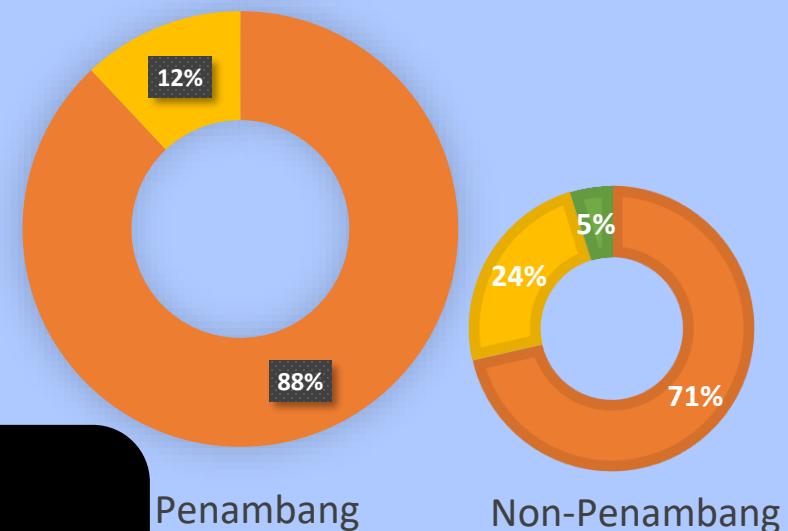


kadar merkuri (ppm)

- 0 - 1.99
- 2.00 - 10.00
- > 10.00

Jumlah Responden:
Daerah kasus: 34 orang
Daerah Kontrol: 15 orang

Lokasi Sampling: Kabupaten Merangin

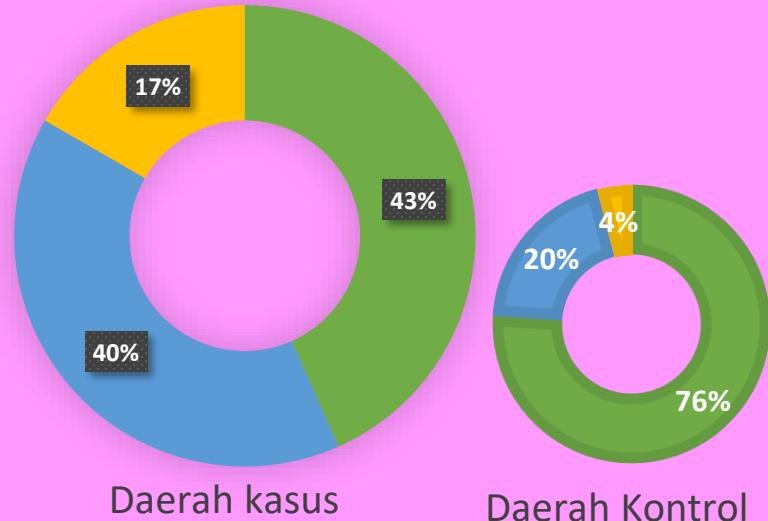


kadar merkuri (ppm)

- 0 - 1.99
- 2.00 - 10.00
- > 10.00

Jumlah Responden:
Penambang: 25 orang
Non-Penambang: 21 Orang

Lokasi Sampling: Kabupaten Dharmasraya

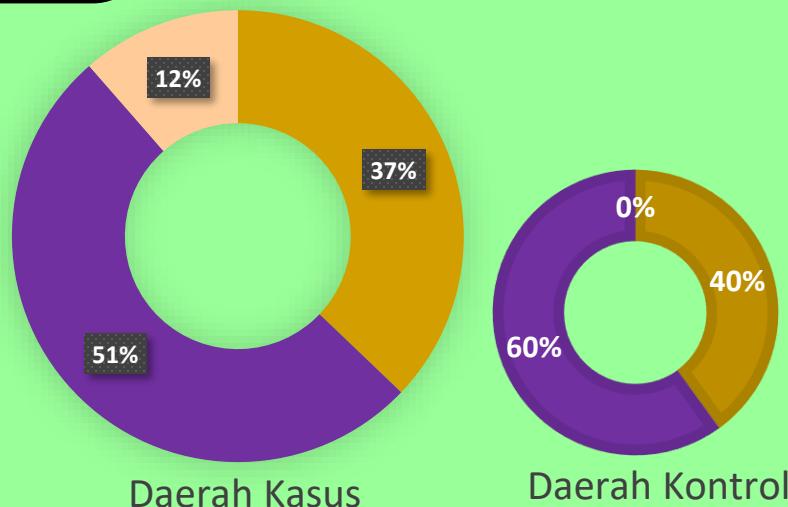


kadar merkuri (ppm)

- 0 - 1.99
- 2.00 - 10.00
- > 10.00

Jumlah Responden:
Daerah kasus: 31 orang
Daerah kontrol: 25 orang

Lokasi Sampling: Kabupaten Kotawaringin Barat



kadar merkuri (ppm)

- 0 - 1.99
- 2.00 - 10.00
- > 10.00

Jumlah Responden:
Penambang: 35 orang
Non-Penambang: 21 Orang

**PERSENTASE
KONSENTRASI MERKURI
PADA RAMBUT**
(Standar WHO:1-2 ppm)

Peta Sebaran PESK



Kementerian ESDM (2016): kegiatan PESK di Indonesia tersebar di 197 Kota/Kabupaten dan 32 Provinsi.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dengan Kementerian ESDM

Nomor: PKS. 7/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2019

Nomor: 03.PJ/05/MEM/2019



PARA PIHAK

KLHK sebagai PIHAK KESATU,
Kementerian ESDM
sebagai PIHAK KEDUA



Tentang

Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A

C

Ruang Lingkup

- a. Pelaksanaan reklamasi hutan dan penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di bidang ESDM
- b. Pengendalian, penertiban, penataan perizinan bidang ESDM pada Kawasan Hutan
- c. Sinkronisasi penggunaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk kegiatan di bidang ESDM
- d. Pengawasan, penanganan permasalahan dan penegakan hukum
- e. **Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai dengan Konvensi Minamata**
- f. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam bidang ESDM
- g. Pengendalian perubahan iklim dan implementasi Nationally Determined Contribution (NDC)
- h. Pelaksanaan inventarisasi bersama sumber daya alam di Kawasan Hutan

B

Maksud

Sebagai upaya bersama untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK didasarkan atas saling membantu dan saling mendukung

Model Pemulihan Tanah Terpapar Bahan Berbahaya Beracun Berupa Merkuri



Kerangka dasar pemulihan tanah terpapar merkuri yang merupakan implementasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)

Model Pemulihan Lahan Terpapar Merkuri yang diusulkan:



Fitoremediasi



Mikoremediasi menggunakan jamur



Soilwashing



Elektrokimia



Remediasi

PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN EMAS NON MERKURI

2017 - 2019



Kab. Lebak



Kab. Luwu



Kab. Kotawaringin Barat



Kab. Lombok Barat



Kab. Kulonprogo
(Pilot Project BPPT)



Kab. Minahasa Utara
(Pilot Project bersama AGC)

Transformasi Sosial Ekonomi

Galeri Program Pengalihan Penggunaan MERKURI

Media Bagi Masyarakat Paningkaban

Desa Paningkaban Kini

Kondisi sungai yang tercemar limbah penambangan

Karung berisi bahan untuk diambil emasnya, berada di pinggir jalan desa

Lokasi Lubang Tambang

Bahan yang siap untuk diolah di Glundung

Limbah Emas di Aliran Sungai

Lokasi dan Alat Pengolahan Emas Glundung di dekat Pemukiman Warga

Mendorong Pengembangan Potensi Lokal

Perajin kayu Desa sedang membuat kerajinan dari limbah kayu

Lengger merupakan salah satu kesenian yang masih ada di Desa Paningkaban

Launching Produk Asli Desa Paningkaban salah satunya kayu

Hasil Kerajinan Warga Paningkaban di Acara Launching Product

Intervensi Pengembangan Usaha

Selain itu potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Paningkaban adalah kerajinan kayu

Fashion Show Jilbab oleh Putri asli Paningkaban dalam acara launching produk hasil warga Paningkaban

Warga Desa Paningkaban yang dikenakan busana warga Paningkaban yang berjaya dengan teknologi modern

Warga Desa Paningkaban yang dikenakan busana warga Paningkaban yang berjaya dengan teknologi modern

Pemasaran produk hasil kerajinan media Instagram Kayon Creative

Pemasaran produk hasil kerajinan media Instagram Kayon Creative

Pemasaran produk hasil kerajinan media Instagram Pasarpaningkaban

Pemasaran produk hasil kerajinan media Instagram Desa Paningkaban

Diproduksi oleh

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Telp. / Fax : (021) 65905639

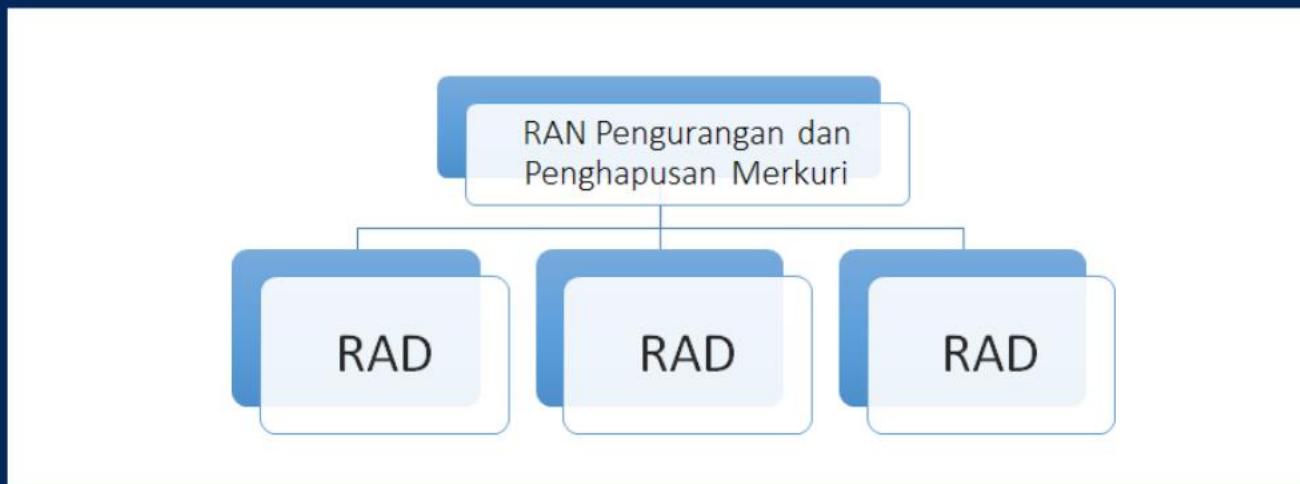
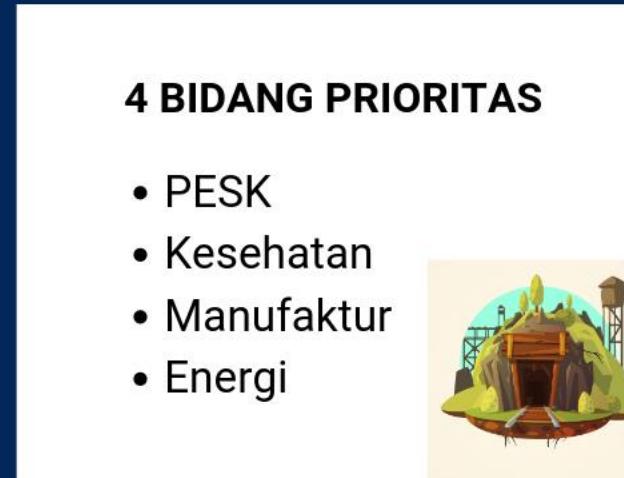
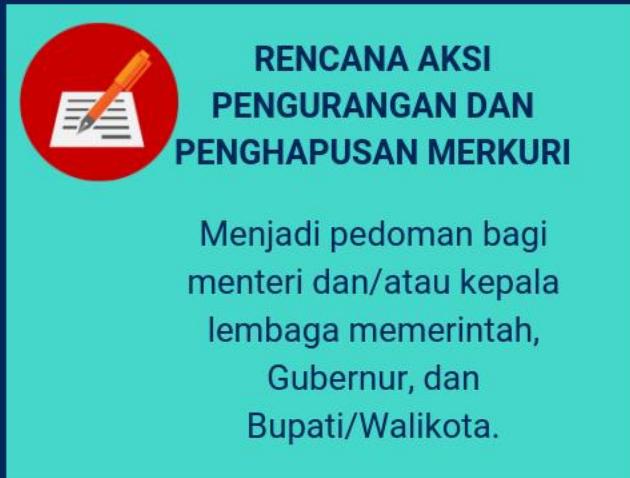
<https://www.beritapaningkaban.id>

<https://www.kayon.id>

<https://www.oleaf.id>

<https://www.pasarpatingkaban.id>

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN PPM





Strategi Pelaksanaan



PENGURANGAN

- penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar K/L;
- penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
- pembentukan sistem informasi;
- penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri; dan
- penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan

PENGHAPUSAN

- penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar K/L;
- penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
- peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM;
- pembentukan sistem informasi;
- penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri;
- pengalihan mata pencarian masyarakat lokal/tempatan; dan
- penguatan penegakan hukum

Tugas dan Wewenang Menteri

- Melaksanakan RAN PPM
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PPM
- mengordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PPM
- mengelola data dan informasi
- Menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAN PPM
- Memberi pendampingan kepada Gubernur, Bupati/Walikota
- Melaksanakan tupoksi focal point nasional Konvensi Minamata



Tugas dan Wewenang menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian

- Melaksanakan RAN PPM
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PPM
- Menyampaikan hasil pelaksanaan RAN PPM
- Memberi pendampingan kepada Gubernur, Bupati/Walikota



Tugas Gubernur

- menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan RAD-PPM provinsi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran RAD-PPM provinsi;
- mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM provinsi; dan
- menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM provinsi provinsi
- memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun RAD-PPM kabupaten/kota

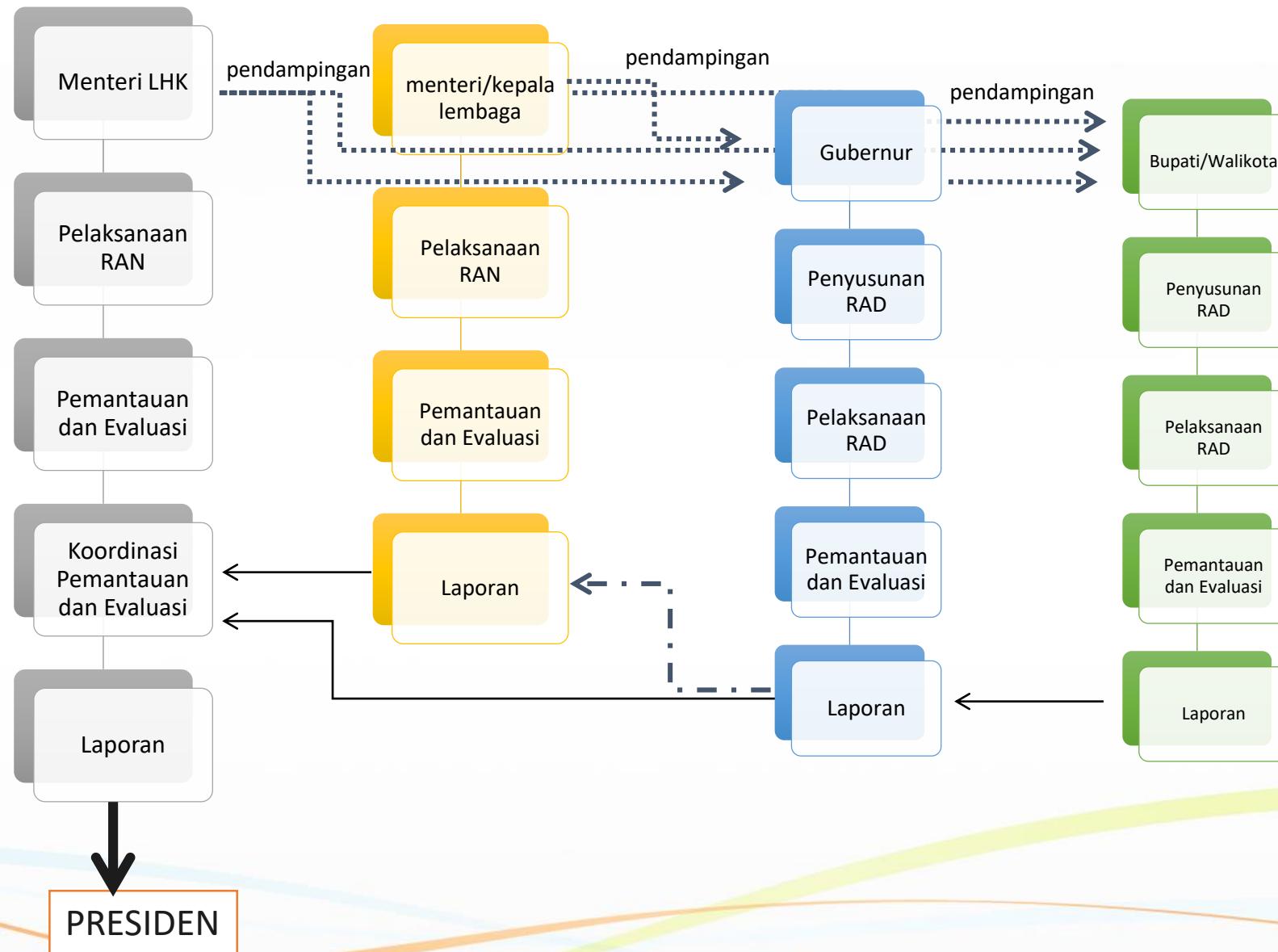
Tugas Bupati/Walikota

- menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan RAD-PPM kabupaten/kota;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran RAD-PPM kabupaten/kota;
- menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM)

- Penyusunan Baseline Merkuri di Daerah
- Penentuan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
- Strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
- Implementasi Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

INTERGRASI VERTIKAL PELAKSANAAN RAN-PPM & RAD-PPM



RENCANA TINDAK LANJUT

Implementasi Perpres 21 Tahun 2019

- Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja pelaksanaan RAN PPM
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis RAN PPM dan RAD PPM
- Pendampingan penyusunan RAD PPM
- Melanjutkan pengembangan teknologi pengolahan emas non merkuri (Kab. Halmahera Selatan, Pulang Pisau, Pohuwato, Bungo, Kuantan Singingi, Kolaka Timur, Kotawaringin Timur, dan Banyuwangi)
- Pemulihan lahan terkontaminasi merkuri (Lebak dan Gunung Botak)
- Penarikan dan penghentian penggunaan alat kesehatan bermerkuri
- Pengelolaan tempat penyimpanan merkuri
- Pengendalian dan pemantauan emisi dan lepasan merkuri
- Gerakan kampanye STOP Merkuri (Media Publikasi, Media Sosial, dan Sosialisasi)



PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21/2019

adalah

*Babak baru upaya pengurangan dan
penghapusan Merkuri di Indonesia!*

A large lecture hall with many rows of desks and students. The perspective is from the back of the room, looking down the rows.

TERIMA KASIH